



Medan, MIMBAR
- Cawapres nomor
urut 3 Mahfud MD
buka suara soal
wacana undur dari
jabatan Menko
Polhukam karena
jadi peserta Pilpres
2024, Selasa (23/1)
malam.

■ Bersambung ke Hal 11

Mahfud Beri Sinyal Mundur dari Kabinet

TKN Prabowo:

Kenapa Baru Sekarang?

TIM Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran merespons pernyataan cawapres nomor urut 3, Mahfud MD yang mengaku siap mundur dari jabatan Menko Polhukam untuk memberikan contoh kepada pejabat lainnya yang menjadi capres ataupun cawapres.

■ Bersambung ke Hal 11

Jokowi: Saya Hargai

PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) menghargai keputusan Mahfud MD yang berencana mundur dari jabatannya sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) usai menjadi cawapres pendamping Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024.

■ Bersambung ke Hal 11



Pakar politik Universitas Paramadina Ahmad Khoiril Umam melihat rencana mundurnya Mahfud MD dari jabatan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) adalah bentuk ketidakpercayaan terhadap independensi, netralitas, termasuk kredibilitas pemerintahan Presiden Joko Widodo.



Imbas Dukung AMIN

JK Dapat Intimidasi dan Gangguan Bisnis

Medan, MIMBAR - Wakil Presiden ke-12 Jusuf Kalla (JK) mengklaim mendapat intimidasi dan gangguan terhadap bisnisnya usai mendukung pasangan calon nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin (AMIN) di Pilpres 2024.

JK mengungkapkan hal tersebut dalam acara Podcast Political Show CNN Indonesia yang disiarkan Selasa, (23/1). Dia bahkan mengklaim tak sekadar mendapat intimidasi dan gangguan terkait bisnisnya usai mendukung AMIN.

■ Bersambung ke Hal 11

Jadwal Salat

14 RAJAB 1445 H

Subuh : 05:20 WIB	Maghrib : 18:38 WIB
Zuhur : 12:40 WIB	Isya : 19:51 WIB
Ashar : 16:02 WIB	

■ Untuk kota Medan sekitarnya

Hidayah Istikharah Politik

Oleh Dr A Rasyid, MA



BANYAK juga mengaku pusing menghadapi persoalan hidupnya sehari-hari. Ada yang pusing tujuh keliling karena air PAM tidak jalan-jalan berminggu dan bahkan berbulan-bulan akibat penggalan paret. Sakitnya, pihak PAM di Medan itu tidak begitu peduli dengan laporan pelanggannya.

Bagi yang punya sumur tentu masih aman, begitu juga bagi yang dekat masjid bisa numpang hidup, tapi bagi yang tidak maka tentu saja akan merasa pusing tujuh keliling.

■ Bersambung ke Hal 11

Akademisi:

Selamatkan Demokrasi!



Jakarta, MIMBAR - Para akademisi tergabung dalam alumni Unhas Makassar pendukung capres-cawapres Ganjar-Mahfud, mengajak masyarakat menyelamatkan demokrasi dari ancaman praktik politik yang tidak sehat.

Pemilu 2024 merupakan momen masyarakat menentukan arah kepemimpinan bangsa, agar tetap sesuai dengan konstitusi UUD 1945.

"Tentu harapan dan impian terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

akan dititipkan di pundak capres yang akan memimpin Indonesia dalam lima tahun ke depannya," ungkap ketua kepanitiaian "Forum relawan demokrasi selamatkan demokrasi Indonesia,"

■ Bersambung ke Hal 11



Rezim Jokowi Abaikan Tata Kelola yang Baik

Jakarta, MIMBAR - Pemerintahan Presiden Joko Widodo dinilai telah mengabaikan tata kelola pemerintahan yang baik, seperti transparansi, akuntabilitas, demokrasi serta penegakan hukum.

Praktisi Good Governance, As'ad Nugroho mengatakan, kondisi tersebut terlihat pada tidak berfungsinya DPR RI sebagai lembaga legislatif dalam mengimbangi pemerintah selaku eksekutif.

"Begitu juga di BUMN, governance-nya buruk. Biasanya di BUMN ada assessment tata kelola, tapi belakangan tidak ada lagi," papar As'ad dikutip dari kanal YouTube Narada Syndicate, Rabu (24/1).

■ Bersambung ke Hal 11

LUAR NEGERI

Dewan Eropa Soroti Jumlah Korban Sipil di Gaza

Gaza, MIMBAR - Majelis Parlemen pada Dewan Eropa (PACE) lewat resolusi yang dikeluarkan pada Selasa (23/1/2024) lalu, menyoroti jumlah korban sipil di Gaza yang luar biasa besar.

Rancangan resolusi mengenai konflik Israel-Palestina yang ditulis anggota parlemen Italia bernama Piero Fassino itu dibahas dan diadopsi dengan 111 suara mendukung, 22 menolak, dan 20 abstain. Resolusi itu menyebutkan pemindahan paksa separuh penduduk Gaza akibat perang telah menghancurkan

■ Bersambung ke Hal 11



selera masing-masing.

"Bernegara itu mengikuti aturan hukum. Jadi kita serahkan pada aturan hukum. Ini kan bukan (perkara) selera, saya setuju atau tidak setuju. Aturan hukumnya bagaimana?"

Karena kita ingin (ini) negara hukum," ujar Anies, ditemui di Kompleks Kepatihan, Kota Yogyakarta, Rabu (24/1).

■ Bersambung ke Hal 11



■ Rakyat menunggu ...

■ Hehehe ...

Dewan Eropa...



Dari Halaman 1

kan kembali kenangan Nakba atau "benca-na", yang merujuk kepada pengusiran massal dan perampasan hak warga Palestina selama perang Arab-Israel 1948.

Kondisi kemanusiaan di Gaza masih mengerikan karena jumlah bantuan yang diizinkan masuk tidak mencukupi. Resolusi itu juga menyebutkan kelompok Palestina Hamas bertanggung jawab atas serangan terhadap Israel dan harus dikecam.

Terkait situasi di wilayah lain di Palestina, PACE menyatakan, "episode kekerasan pe-

mukim terhadap warga Palestina sudah berubah menjadi pola mengkhawatirkan yang menimbulkan korban jiwa."

Dalam resolusi itu, PACE juga memperingatkan bahaya perluasan konflik menjadi konflik regional yang tak terhindarkan. Resolusi itu juga menyatakan bahwa konflik Gaza tidak akan membawa perdamaian dan keamanan di kawasan.

PACE menyerukan solusi dua negara yang meliputi pembentukan negara Palestina merdeka berdasarkan pada batas-batas yang diakui secara internasional.

Dengan latar belakang itulah, PACE me-

nyerukan pembebasan segera dan tanpa syarat semua warga Israel yang disandera Hamas.

Mereka juga menyerukan perpanjangan gencatan senjata di Gaza, semua pihak agar mematuhi hukum internasional dan hukum kemanusiaan internasional, serta mendesak perundingan damai antara Israel dan Palestina.

Israel melancarkan serangan mematikan di Jalur Gaza sejak serangan lintas batas Hamas pada 7 Oktober, yang menurut Tel Aviv menewaskan 1.200 orang. Sedikitnya 25.490 warga Palestina, yang kebanyakan perempuan dan anak-anak, terbunuh, dan 63.354 terluka, kata otoritas kesehatan Palestina.(rep/js)

Anies: Bernegara...

Dari Halaman 1

SILAKAN PAKAR BICARA

Ia pun mempersilakan para pakar hukum tata negara berbicara menyampaikan gagasan terkait pernyataan Presiden Jokowi tersebut.

"Monggo para ahli hukum tata negara menyampaikan penjelasan, apakah yang disampaikan bapak presiden sesuai dengan ketentuan hukum atau tidak," kata dia. "Jadi kita rujuk kepada aturan hukum..., selanjutnya biar masyarakat yang menilai," imbuh dia.

Menurut dia, para ahli hukum perlu menyampaikan pendapatnya, agar masyarakat mengetahui bahwa aturan negara ini tidak berdasarkan kepentingan masing-masing.

"Aturan hukum kita bagaimana sih, kalau tidak (tahu)... nanti kita akan mengatakan itu benar atau salah berdasarkan pandangan subjektif masing-masing. Kalau aturan hukum menyatakan tidak boleh, berarti tidak boleh, kalau menyatakan boleh, berarti boleh," ucapnya.

SEBELUMNYA...

Sebelumnya, Presiden Jokowi memberikan tanggapannya saat ditanya keberpihakannya ke pasangan capres-cawapres tertentu dalam kontestasi Pilpres 2024 ini (lihat berita terkait di halaman 12 Koran MimbarUmum berjudul, "Jokowi: Presiden Boleh Kampanye, Boleh Memihak..." - red).

Namun, tanggapan yang diberikan Presiden

adalah bertanya balik kepada wartawan.

"Itu yang mau saya tanya, memihak enggak?" ujar Jokowi, sambil tertawa, saat memberikan keterangan pers di Terminal Selatan Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (24/1), didampingi beberapa petinggi kabinet, diantaranya Menhan Prabowo Subianto dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.

Lalu, wartawan juga bertanya, apakah Kepala Negara akan berkampanye untuk pasangan capres-cawapres tertentu di pemilu ini. Lalu Presiden Jokowi pun menyatakan boleh saja dia berkampanye, asalkan tidak memakai fasilitas negara. "Ya boleh saja saya kampanye, tapi yang penting tidak gunakan fasilitas negara," tuturnya. (kps/cp/js)

Selamatkan Demokrasi...

Dari Halaman 1

Anwar Mattawape --dinukil dari keterangan tertulis diterima di Jakarta, dilansir dari mediaindonesia, Rabu (24/1).

BUKAN KARENA GIMIK

Menurut Anwar, demokrasi adalah dermag atau tempat berlabuh orang-orang yang punya nilai, integritas dan etika. Secara tegas ia juga mengaku, pihaknya mendukung Ganjar-Mahfud sebagai capres-cawapres 2024.

"Mari kita jaga demokrasi Indonesia. Kami juga mendorong generasi milenial mengambil peran menentukan pemimpin Indonesia 2024. Sebab suara generasi milenial sangat menentukan kemenangan. Mereka harus kami berikan informasi yang banyak, terutama dengan ilmu pengetahuan

dari para ahlinya, akademisi, analisis-analisis, bahwa memilih bukan karena gimik atau konten-konten," tambah Mattawape.

BONUS DEMOGRAFI

Direktur Politik 5.0 TPN Ganjar Mahfud, Eko Nugroho, mengungkapkan, pada 2045 Indonesia mendapatkan bonus demografi yang sangat luar biasa.

Pemanfaatan bonus demografi yang baik dan bijak akan menjadi daya dorong yang sangat luar biasa mencapai Indonesia Emas di 2045.

"Yaitu Indonesia menjadi salah satu dari 5 negara besar, mandiri dalam ekonomi, pertahanan dan fakta pergaulan internasional," ungkapnya.

Eko menjabarkan, titian yang pertama harus menyiapkan tenaga kerja atau pun angkatan kerja yang bisa memanfaatkan bonus demografi terse-

but.

Selain itu dibutuhkan juga kesiapan industri-industri di sekitar infrastruktur. Saat ini infrastruktur-infrastruktur khususnya di jalan raya sudah terbangun.

Menambahkan, akademisi Unhas Armin Arsyad meminta dengan tegas agar Presiden Jokowi dapat menyelesaikan tugas akhirnya sebagai kepala negara bijaksana dan menjaga netralitas. Dengan demikian, pemilu bisa berjalan baik dan ada terjanjinya kepercayaan dengan KPU dan Bawaslu serta pihak-pihak terkait. Pernyataannya ini menyinggung sikap Jokowi yang kerap memberikan kode dukungan ke salah satu capres di Pilpres 2024. "Di akhir periode ini harusnya Pak Jokowi husnul khotimah. Saya menyampaikan apa yang harus saya sampaikan, dan memberikan pencerahan ke masyarakat," tutupnya. (mi/cp/js)

Mahfud Beri...

Dari Halaman 1

Hal itu disampaikan Mahfud saat berbicara dalam kegiatan "Tabrak Prof" yang digelar di Semarang, Jawa Tengah.

Berdasarkan pantauan secara daring lewat tayangan langsung (live) saluran Youtube Mahfud MD Official, dia mengatakan, "Apa yang disampaikan Pak Ganjar (Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo) ke publik sore ini adalah kesepakatan saya dengan Pak Ganjar sejak awal. Bahwa, saya pada saatnya yang tepat nanti pasti akan mengajukan pengunduran diri secara baik-baik. Jadi tidak ada pertentangan dengan Pak Ganjar."

Eks hakim konstitusi ini pun menyinggung soal pernyataannya pascadebak keempat Pilpres 2024 yang digelar akhir pekan lalu.

"Kalau saudara semua cermat, pada saat penutupan debat, saya kan membacakan sebuah pernyataan, saya berterima kasih ke Pak Jokowi yang telah mengangkat saya empat setengah tahun lalu sebagai menko polhukam," kata Mahfud.

Sebelumnya, saat kampanye di Kendal, Jawa Tengah, Ganjar mengaku menyarankan Mahfud mundur dari posisi Menko Polhukam untuk menghindari konflik kepentingan (conflict of interest) di kontestasi Pilpres 2024.

Menurut Ganjar, konflik kepentingan berpotensi muncul saat pejabat publik juga terlibat kontestasi politik seperti Pemilu 2024.

"Itulah yang sejak awal kita bicara, apakah seorang yang sekarang menjabat di dalam jabatan publik, apalagi di level menteri itu mundur atau tidak. Gubernur, bupati, wali kota mundur atau tidak. Semua di jabatan publik. Ketika keputusannya tidak dan diperbolehkan maka ada potensi conflict of interest," kata Ganjar Pranowo di Ponpes Manbaul Hikmah, Kaliwungu, Kendal.

Ganjar berkata, sudah ada beberapa kasus pejabat publik memanfaatkan fasilitas negara untuk kampanye. Namun pejabat itu menutupi dengan dalih kunjungan kerja.

Ia tak menyebut nama pejabat yang memanfaatkan fasilitas negara untuk kampanye. Ganjar hanya mengingatkan bahwa pemanfaatan fasilitas negara itu berisiko karena dilaksanakan oleh rakyat.

"Dengan beberapa kejadian, orang menggunakan fasilitas, menggunakan alat transportasi

alasannya kunjungannya kunker tapi ternyata kampanye. Kan, rakyat bisa nilai itu. Maka kita sedang mengambil risiko itu. Maka saya sarankan mundur. Ubahlah aturan, termasuk Pak Mahfud," ujar Ganjar.

Ganjar mengaku banyak mendiskusikan bersama Mahfud dan tim soal usulan pejabat publik mundur. Selain itu, Ganjar juga mendorong agar aturan mengenai pejabat sekelas menteri maupun wali kota tak harus mundur jika maju pilpres diubah.

"Jadi kita diskusi beliau soal ini agar fair lebih baik mundur lah. Kalau aturan mau dibuat lebih bagus, pasti rakyat lebih senang. Karena tidak ada mengklaim apakah ini bansos milik kementerian, apakah berasnya milik kementerian. Itu enggak bisa lagi, semua orang akan merasa fair," ujar eks Gubernur dua periode Jawa Tengah tersebut.

Sebagai informasi, dari tiga paslon peserta Pilpres 2024, terdapat calon yang masih menduduki jabatan sebagai menteri dan kepala daerah.

Mereka adalah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang maju sebagai capres nomor urut 2. Prabowo didampingi Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres. Gibran masih menjabat sebagai Wali Kota Solo.

Lalu, Mahfud MD, cawapres nomor urut 3 yang menjabat sebagai Menko Polhukam. Selain itu di timses pun terdapat pula sejumlah menteri hingga kepala daerah.

Ketiganya tidak mundur dari jabatannya karena memiliki sandaran hukum dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2023 yang mengatur tata cara pengajuan cuti menteri, gubernur, wali kota/bupati untuk kampanye Pilpres 2024.

PP yang diteken Presiden Jokowi pada 21 November 2023 itu mengubah beberapa ketentuan dalam PP Nomor 32 Tahun 2018 yang pengaturannya meliputi pengaturan bahwa menteri dan pejabat setingkat menteri yang dicalonkan sebagai calon Presiden dan calon Wakil Presiden tidak harus mundur dari jabatannya, permintaan persetujuan dan izin dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, serta tata cara pelaksanaan cuti dalam pemilihan umum.

Pada Pasal 18 Ayat 1 dan Pasal 1a PP 53/2023 diatur bahwa menteri hingga wali kota tidak perlu mundur dari jabatan meskipun maju sebagai capres atau cawapres.

Rezim Jokowi...

Dari Halaman 1

Menurut As'ad, berbagai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik tidak berjalan karena sejak periode awal sebagai Kepala Negara, Jokowi tidak memiliki perhatian besar.

"100 hari pertama pemerintahan, justru terjadi pelemahan KPK yang menunjukkan lemahnya komitmen Presiden Jokowi pada pemberantasan korupsi. Padahal persoalan korupsi itu adalah akar dari buruknya tata kelola," kritiknya.

Terbaru, Kepala Negara dianggap gagal mencegah benturan kepentingan antara jabatan dengan kepentingan keluarga. Hal inilah yang memicu isu praktik KKN kembali ramai.

"Ini sebabnya Pak Jokowi tidak ikut dalam gerakan reformasi, sehingga tidak bisa memahami bahwa musuh utama reformasi adalah KKN. Maka, komitmen dia untuk memberantas KKN pun lemah," pungkasnya. (rm/js)

JK Dapat...

Dari Halaman 1

"Lebih dari itu (intimidasi dan gangguan terhadap bisnis usai mendukung AMIN)," kata JK menjawab pertanyaan soal apakah mendapat intimidasi gangguan bisnis karena mendukung AMIN.

JK enggan mengungkap bentuk-bentuk intimidasi dan gangguan bisnis yang ia terima usai mendukung AMIN di Pilpres 2024. Ia mengaku tak ingin masyarakat tahu kesulitan yang dialami dirinya. JK menganggapnya sebagai risiko atas pilihan politik yang diambil.

"Ndak usah, lah, saya sampaikan di sini. Sudah, lah, tak usah saya sampaikan. Saya tidak ingin masyarakat mengetahui kesulitan saya. Itu risiko dari saya," ujar dia.

JK juga mengklaim saat ini para pejabat negara dan menteri di kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) takut untuk bertemu dirinya. "Sekarang orang takut ketemu saya," ujar dia.

JK enggan menduga alasan dibalik para pejabat negara itu takut untuk bertemu dirinya. Namun, jika itu imbas keputusan politik mendukung AMIN, JK menyebutnya sebagai fenomena demokrasi tak lagi dihargai. "Enggak tahu juga. Mungkin karena saya tidak satu grup dengan presidennya, ya, menterinya takut ketemu. Saya, sih, biasa biasa saja tapi teman-teman pejabat takut lah. Mau berfoto pun takut," ujar dia.

"Itu berarti tidak menghargai demokrasi kan, orang kita sendiri apalagi pemimpin harus menghargai pilihan rakyatnya. Harus menghargai," sambungnya. (cnni/js)

Kenapa Baru...

Dari Halaman 1

Prabowo diketahui masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan, sedangkan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wali Kota Solo.

Wakil Ketua TKN, Habiburrahman mengatakan, undang-undang tidak mengharuskan seorang menteri mundur dari jabatannya apabila menjadi capres. Dia heran mengapa Mahfud menganggap keputusannya mundur itu positif.

Padahal, kata dia, Mahfud sejak awal menjadi cawapres hingga sekarang berkampanye tetap menjabat sebagai Menteri Polhukam. "Sejak tanggal 13 November 2023 sampai hari ini, hari ke-72, statusnya rangkap sebagai menteri aktif dan sebagai cawapres," kata Habiburrahman kepada wartawan di Media Center TKN, Jakarta Selatan, Rabu (24/1).

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu menambahkan, apabila Mahfud tak kunjung mundur hingga pekan depan, maka akan semakin lama dia rangkap status. Lagi pula, Mahfud menyatakan siap mundur saat masa kampanye hanya tersisa 22 hari lagi.

"Jadi sudah banyak sekali, sudah 75 persen (masa kampanye Pilpres 2024) dilaksanakan dengan rangkap status. Kenapa baru sekarang bilang (siap mundur)?" ujarnya.

"Nah ini kan pertanyaan rakyat dari arus bawah, silakan Pak Mahfud menjawab dan rakyat akan menilai," kata Wakil Ketua Komisi III DPR RI itu menambahkan. (rep/js)

Jokowi: Saya...

Dari Halaman 1

Bagi Jokowi, rencana tersebut merupakan hak pribadi Mahfud MD.

"Ya itu hak dan saya sangat menghargai," kata Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1).

Sementara, menyahuti respon Presiden Jokowi yang menghargai rencananya mundur dari jabatan menteri, Mahfud MD menyebut sikap itu sudah sesuai tugasnya.

"Memang, memang tugas presiden menghargai," kata Mahfud ditemui di Pondok Pesantren Annur, Sewon, Bantul, DIY, Rabu (24/1). (cnni/js)



Istikharah Politik

Dari Halaman 1

Ada juga yang pusing karena masih bingung menentukan calon Presiden di masa depan. Semua calon dinilai tidak memiliki kemampuan untuk mensejahterahkan rakyatnya pada masa depan. Tetapi jika dihadapi dengan persoalan ini sebaiknya salat istikharah saja, sebagai istikharah politik.

Shalat Istikharah adalah shalat sunah yang dilakukan untuk memohon petunjuk kepada Allah atau dipilhkan antara beberapa pilihan yang paling baik untuk dilaksanakan. Shalat ini sangat penting untuk dilaksanakan karena manusia adalah makhluk yang lemah dan sangat butuh pertolongan Allah dalam setiap urusannya.

Setinggi apapun ilmu yang dimiliki, manusia tidak akan mengetahui perkara yang gaib. Ia juga tidak mengetahui manakah kejadian yang baik dan buruk pada masa yang akan datang.

Seorang muslim sangat yakin dan tidak ada keraguan sedikitpun bahwa yang mengatur segala urusan adalah Allah Ta'ala. Dialah yang menakdirkan dan menentukan segala sesuatu sesuai yang Dia kehendaki pada hamba-Nya. Allah Ta'ala berfirman:

"Dan Rabbmu menciptakan apa yang Dia kehendaki dan memilihnya. Sekali-kali tidak ada pilihan bagi mereka. Maha suci Allah dan Maha Tinggi dari apa yang mereka persekutukan (dengan Dia). Dan Tuhanmu mengetahui apa yang disembunyikan (dalam) dada mereka dan apa yang mereka nyatakan. Dan Dialah Allah, tidak ada Rabb (yang berhak disembah) melainkan Dia, bagi-Nyalah segala puji di dunia dan di akhirat, dan bagi-Nyalah segala penentuan dan hanya kepada-Nyalah kamu dikembalikan" [QS. al-Qashash: 68-70].

Oleh karena itu, Allah SWT memerintahkan kepada hamba-hamba-Nya agar senantiasa memohon pertolongan kepada-Nya agar diberikan petunjuk untuk memperoleh kebaikan bagi kehidupannya dan terhindar dari keburukan. Cara yang terbaik dalam memohon pertolongan kepada Allah SWT adalah melalui shalat. (*)